

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang–undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia

Muhammad Syam Riva'i, 2023

HAK KEPERDATAAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERGABUNG DENGAN ORGANISASI TERORIS INTERNASIONAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592)

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 484)

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 553)

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11204/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 11 Oktober 2014

Montevideo Convention 1933 on the Rights and Duties of States at Montevideo, Uruguay, on December 26, 1933

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 by the United Nations General Assembly resolution 217A in Paris on 10 December 1948

Convention on the Reduction of Statelessness 1961 by General Assembly resolution 896 (IX) on 30 August 1961

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 by the United Nations General Assembly resolution 2200A (XXI) on 16 December 1966 diratifikasi tertanggal 28 Oktober 2005 dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak–Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Convention on the Rights of the Child 1990 by the United Nations General Assembly resolution 44/25 on 20 November 1989 diratifikasi tertanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak–Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)

Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dedi, Ismatullah & Beni Ahmad Saebani, 2018. *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia)*. 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Febri, Ramdani, 2020. *300 Hari di Bumi Syam: Perjalanan Seorang Mantan Pengikut ISIS*. Jakarta: Milenia Book Publishing.
- Hotma, P Sibuea, 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jawahir, Thontowi & Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Jessica, Trisko Darden, 2019. *Tackling Terrorists' Exploitation of Youth*. Amerika: American Enterprise Institute.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. 5th ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saija, Ronald & Roger FXV Letsoin, 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. 3rd ed. Yogyakarta: Deepublish.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sarlito, Wirawan Sarwono, 2012. *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro & Irma Setyowati, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. 19th ed. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny, 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umi, Salamah, Munir & Suratman, 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Malang: Madani.
- Wahono W & Abdul Atsar, 2019. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.

Karya Ilmiah

- Anggara, Bertho, 2019. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. *Doctoral Dissertation, UIN Raden Fatah Palembang*, p. hlm 24.
- Azmi, Muhammad Yuris, Hernawan Hadi & Moch Najib Imanullah, 2016. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Privat Law*, 4(1).
- Baiquni, Muhammad Iqbal, Heni Rosida & Ahsana Nadiyya, 2021. Repatriasi Warga Negara Indonesia Eks-ISIS: Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Bedah Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.538>.
- Balenina, Chintami Dian, 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. *Bestuur*, 7(1). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Bari, Saiful, 2020. Pengaturan Memperoleh Kembali Status Warga Negara Indonesia Bagi ISIS Eks WNI Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor

- 2 Tahun 2007 Dan Konsep Masalah Mursalah. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1561>.
- Bleker, Agnes Dyah Ayu Cahyani, 2020. Analisis Yuridis Pro Dan Kontra Kepulangan Orang Indonesia Eks Isis Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Bachelor Thesis, Universitas Pelita Harapan Surabaya*, p. hlm 1.
- Cristiana, Maya, Al Khanif & Bayu Dwi Anggono, 2022. Kebijakan Pemulangan WNI Eks Islamic State of Iraq and Syria Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(1). <https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.30512>.
- Erlandita, Melati Puspasari, 2021. Hak Kewarisan Warga Negara Indonesia yang Diadopsi oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hukum Islam. *Gorontalo Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1370>.
- Fatahaya, Shafira & Rosalia Dika Agustanti, 2021. Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal USM Law Review*, 4(2). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.
- Firmansyah, Idris, Slamet Suhartono & Krisnadi Nasution, 2020. Status Warga Negara Indonesia Anggota Teroris ISIS. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3).
- Fitrah, Farrel Alanda, 2021. Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGn Journal of Law (SIGn Jurnal Hukum)*, 2(2).
- Ibrahim, Rifki Septiawan, 2018. Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2).
- Kadria, Sali, 2017. A Historical View About Concepts, Theories and Types of Nationalism. *ANGLISTICUM: Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(6). [http://dx.doi.org/10.0001/\(aj\).v6i6.1478](http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v6i6.1478).
- Khairunisa, Amelia & Atik Winanti, 2021. Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

- Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4).
<http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.774-784>.
- Kumaladewi, Nur Adi, 2015. Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga. *Jurnal Repertorium*, 2(2).
- Lazuardi, Glery, 2020. Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1).
<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.
- Lutfi, Khoirur Rizal, Wardani Rizkianti & Heru Sugiyono, 2021. Peningkatan Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Transnasional bagi Masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(1).
<https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i1.10855>.
- Maryani, Lina & Tabah Sulisty, 2021. Pemulangan “Warga Negara Indonesia eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)” Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114>.
- Purba, Dhea Aulia M, 2019. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS QUALITY Medan*, p. hlm 7.
- Ramanda, Riskha, Zarina Akbar & RA Murti Kusuma Wirasti, 2019. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2).
- Rapik, Mohamad & Bunga Permatasari, 2020. Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Rijal, Najamuddin Khairur, 2017. Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1).
<https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2670.45-60>.
- Rusdi, Moh Ramdan, 2020. Status Kewarganegaraan WNI yang Bergabung Dengan ISIS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(17).
- Ryandi, Manuel Sumedi & Rasji, 2021. Tinjauan Yuridis Pemulangan Anak-anak Dibawah Umur 10 Tahun Warga Negara Indonesia eks ISIS (Islamic State

- of Iraq and the Levant) Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2). <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17760>.
- Samsul, Arifin, 2020. Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS. *Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1295>.
- Sharfina, Vitra Hana & Satria Sukananda, 2019. Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3650>.
- Sholehudin, Miftahus, 2015. ISIS, Pemberontak, dan Teroris dalam Hukum Internasional. *El-Qudwah: Jurnal Penelitian Integrasi Sains dan Islam*, 10(1). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit>.
- Sigit, Rahmawati Novia & Novianti Novianti, 2020. Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1). <https://doi.org/10.22437/up.v1i1.8303>.
- Suhara, Ade Idra & Tunziah Tunziah, 2021. Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1). [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6768](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768).
- Sumawiharja, Farhan Arif & Adis Imam Ismunandar, 2020. Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1).
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari & Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2021. Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2). <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Suyanto, Heru, Heru Sugiyono & Ilvana Oktalia, 2020. Implementasi Eksekusi Putusan Bani dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 7(2). <http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v7i2.2101>.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia & Muhammad Rusli Arafat, 2020. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena*

Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 18(1).
<http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.

Waode, Mustika, 2021. Status Stateless Warga Negara Indonesia Eks-ISIS dalam Perspektif HAM Internasional. *Literasi Hukum*, 5(1).

Sumber Lainnya

Ayuningtyas, Kusumasari. (2021, December 10). *Nasib Ratusan Anak WNI eks-ISIS di Suriah Masih Belum Jelas*. Retrieved February 19, 2023, from DW.com: <https://www.dw.com/id/nasib-anak-wni-eks-isis-di-suriah-belum-jelas/a-60067296>

BBC Indonesia. (2020, February 13). *Anak Indonesia eks ISIS di Suriah: 'Desa diserang roket, saya lari, setelah itu tak melihat lagi keluarga saya'*. Retrieved February 18, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51470700>

Christiatuti, Novi. (2019, March 23). *Pasukan Demokratik Suriah Nyatakan ISIS Telah Dikalahkan Total*. Retrieved December 21, 2022, from <https://news.detik.com/internasional/d-4480352/pasukan-demokratik-suriah-nyatakan-isis-telah-dikalahkan-total>

CNN Indonesia. (2020, February 13). *Istana: 689 WNI Eks ISIS Stateless*. Retrieved April 4, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213123946-20-474239/istana-689-wni-eks-isis-stateless>

CNN Indonesia. (2020, February 15). *Penolakan WNI Eks ISIS dan Ujung Jalan Program Deradikalisasi*. Retrieved December 22, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214210132-32-474848/penolakan-wni-eks-isis-dan-ujung-jalan-program-deradikalisasi>

CNN Indonesia. (2021, September 15). *BNPT Buka Peluang Jemput Anak WNI Eks ISIS*. Retrieved December 22, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915212648-12-694956/bnpt-buka-peluang-jemput-anak-wni-eks-isis>

Irham, Muhammad. (2020, February 14). *Eks ISIS asal Indonesia dan program deradikalisasi: 'Pemerintah belum siap dalam format dan pelaksanaan'*.

- Retrieved January 18, 2023, from BBC.com:
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51493322>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Online*. Retrieved January 18, 2023, from
KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>
- Kementerian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia. 2018. *Lindungi Anak dari Jaringan Terorisme dan Paham
Radikalisme*. Publikasi, Siaran Pers Nomor B-
230/Set/Rokum/MP.01/11/2018, KemenPPPA RI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2020. *KPAI: Pemerintah Wajib Lindungi
Anak WNI Eks ISIS*. Publikasi, Utama, Tinjauan, Tim KPAI.
- Satria, Alif. (2022, May 20). *Diperlukan Tindakan Cepat Terhadap WNI di Kamp-
kamp Pengungsi ISIS*. Retrieved February 18, 2023, from
[https://www.benarnews.org/indonesian/opini/wni-suriyah-
05202022223059.html](https://www.benarnews.org/indonesian/opini/wni-suriyah-05202022223059.html).
- Shams, Shamil. (2021, January 30). *PBB Desak Repatriasi 27.000 'Anak-anak ISIS'
dari Suriah*. Retrieved February 18, 2023, from DW.com:
[https://www.dw.com/id/pbb-desak-repatriasi-puluhan-ribu-anak-anak-isis-
di-suriyah/a-56391107](https://www.dw.com/id/pbb-desak-repatriasi-puluhan-ribu-anak-anak-isis-di-suriyah/a-56391107)